**ALASAN PENIADANAAN PIDANA ATAS TERJADINYA TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

Oleh : *Syawila Dara Kamila*

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana, HZ., SH., LL.M

Pembimbing II : Ferawati, SH., MH

Alamat: Jalan Rambutan V Blok A Nomor 5

Email : syawiladarak@gmail.com

ABSTRACT

At the beginning of 2019 the world faced health problems due to the virus originating from Wuhan which was Corona Virus Disease (Covid-19). The spread of this virus spread extensively throughout the world, including Indonesia. The impact of this pandemic affects crime rates, crime rates and distribution maps in various worlds. One of the influencing variables is the government's policy on social distancing and lockdown, which in Indonesia was modified into Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Seeing the difficult situation causes various changes in human behavior. The urge to meet the necessities of life encourages someone to commit crimes because it is difficult to earn money. Restrictions on people's freedoms in the pandemic era have reduced people's rights. The Indonesian state has the ideals stated in the Preamble to the 1945 Constitution, namely "the government of the state of Indonesia which protects the entire Indonesian nation and the entire homeland of Indonesia." This means that the state was formed to protect and prosper its people. This study aims to determine the forms of criminal acts that occurred during the Covid-19 pandemic and to find out the reasons for the elimination of criminal acts for the occurrence of criminal acts during the Covid-19 pandemic.

This type of research is normative legal research because it uses literature study in searching the data. This research is descriptive in nature which provides detailed data on the existing problems. This study uses qualitative data analysis which means explaining and concluding the forms of criminal acts that occurred during the Covid-19 pandemic and the reasons for eliminating the occurrence of criminal acts during the Covid-19 pandemic. This research uses secondary data or scientific data that has been codified.

The results of the study explain that first, the forms of criminal acts that occurred during the Covid-19 pandemic were cybercrime, domestic violence and street crimes. Second, one of the reasons for the abolition of the crime is the power of coercion (*overmacht*). *Overmacht* is a condition where a person commits a crime because of a forced situation and due to unavoidable power. When the Covid-19 pandemic is an emergency situation that is faced between human safety and obedience to the law, the choice is human safety. However, Covid-19 does not necessarily become the reason for eliminating all criminal acts, one must pay attention to an evil mental attitude or an inner attitude to save oneself from an emergency situation. Prosecution can be abolished if the mental attitude is to save itself, not the evil mental attitude to take advantage or cause great loss.

Keywords: Crime-Covid-19 Pandemic-Reasons for Abolition of Crime.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2019, dunia menghadapi persoalan kesehatan dampak dari virus yang berasal dari Wuhan. *Corona virus* merupakan golongan virus yang menjadi penyebab penyakit pada manusia serta hewan.¹ Pada tanggal 11 Februari 2020 *World Health Organization (WHO)* mengumumkan nama baru yakni *Corona virus disease 2019 (Covid-19)*.² Tertanggal 30 Januari 2020 melalui *WHO* memutuskan wabah *Covid-19* pada tanggal 11 Maret 2020 wabah ini dinyatakan sebagai pandemi.³ Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menanggulangi pandemi *Covid-19* ini seperti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana nasional.⁴

Dampak dari pandemi *Covid-19* ini berpengaruh pada aspek kriminalitas. Angka kejahatan (*crime rate*) dan juga peta sebaran (*crime distribution rate*) di berbagai belahan dunia. Salah satu variabel kunci yang menentukan angka dan sebaran kejahatan di masa pandemi ini adalah kebijakan pemerintah tentang *social distancing*, *lockdown*, *work from home*, yang di negara

kita dimodifikasi menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)⁵. Dampak lainnya adalah perekonomian anjlok, pertumbuhan ekonomi mandeg, membludaknya individu di PHK (pemberhentian kerja), dirumahkan, ruang gerak perusahaan dibatasi, omzet usaha mikro kecil menengah (UMKM) menyusut, bahkan tidak beroperasi sama sekali, dan meningkatnya jumlah orang miskin yang diperkirakan menjadi 37,9 juta orang atau 14,35%.⁶

Melihat situasi sekarang yang serba sulit, menyebabkan berbagai perubahan perilaku manusia. Pola aktivitas rutin yang berubah drastis akibat masa darurat *Covid-19* dan pemenuhan akan kebutuhan pokok yang harus terus berjalan menyebabkan timbulnya konflik dalam hal ini. Desakan untuk memenuhi kebutuhan hidup akan mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan dikarenakan sulitnya mencari uang pada saat ini.⁷

Ketika membicarakan pembatasan kebebasan masyarakat di era pandemi, hal ini banyak berkaitan dengan hak-hak. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk hidup sejahtera lahir bathin. Karena mitigasi ini menyebabkan berkurangnya hak-hak masyarakat.⁸ Negara Indonesia memiliki cita-cita yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni "*Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan*

¹ Rela Rizki Pratiwi, Hasrina Nurlaily, Demi Artha, "Analisa Yuridis Penetapan *Covid-19* sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Journal Inicio Legis*, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Volume 1 No. 2, Oktober 2020, hlm. 2.

² Adityo Susilo, "*Corona Virus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*", *Jurnal Penyakit dalam Indonesia*, Universitas Indonesia, Volume 7 No. 1, Maret 2020, hlm. 45.

³ Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan dan Anisa Ashari, "Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7 No. 7 2020, hlm. 582

⁴ Eko G. Samudro, "Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional *Covid-19* yang Mengancam Ketahanan

Nasional", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Universitas Pertahanan, Vol. 26 No. 2 Agustus 2020, hlm. 133.

⁵ Harkristuti Harkriswono, "Angka Kejahatan dan Reaksi Sistem Peradilan Pidana di Masa Pandemi *Covid-19*", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 1 No. 1, Oktober 2020, hlm. 36.

⁶ <https://money.kompas.com/read/2020/05/05/125329026/akibat-corona-jumlah-penduduk-miskin-ri-bisa-capai-379-juta-orang?page=all>, diakses tanggal 9 Oktober 2021.

⁷ Wibowo Hadiwardoyo, "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi *Covid-19*", *BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship*, Vol. 2 No. 2 April 2020, hlm. 88

⁸ Maradona, *Aspek Pidana dalam Penegakan Hukum pada Kedaruratan Kesehatan *Covid-19: Tinjauan Fungsi dan Keterbatasan Hukum Pidana di Masa Pandemi**, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 15 Oktober 2021.

seluruh tumpah darah Indonesia.” Artinya negara dibentuk untuk melindungi dan mensejahterakan serta membahagiakan masyarakatnya.⁹

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “**Alasan Peniadanaan Pidana atas Terjadinya Tindak Pidana Pencurian di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah bentuk-bentuk tindak pidana yang terjadi di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*?
2. Apakah alasan peniadanaan pidana atas terjadinya tindak pidana di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana yang terjadi di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- b) Untuk mengetahui alasan peniadanaan pidana atas terjadinya tindak pidana di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b) Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- c) Untuk menambah referensi kepustakaan universitas riau dan sebagai sumbangsih peneliti terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Utilitarianisme

Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.¹⁰ Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748- 1831). Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Standar penilaian yang dipakai adalah “apakah suatu tindakan menghasilkan kebahagiaan”. Selanjutnya, Bentham mengemukakan agar pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual.¹¹

2. Teori Anomie

Teori anomie dikemukakan oleh Sosiolog Perancis, Emile Durkheim dan Robert Merton. Menurut Durkheim perubahan sosial yang cepat dan mencekam dalam masyarakat memiliki dampak yang besar terhadap segala kalangan dalam masyarakat. Nilai-nilai utama dan nilai yang telah diterima oleh masyarakat menjadi kabur dan lenyap. Kondisi tersebut mengakibatkan timbulnya ketidakpastian norma bahkan ketiadaan norma.¹²

Pengertian anomie yakni “adanya pembagian antara tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam suatu masyarakat yang terstruktur”. Contohnya, adanya perbedaan-perbedaan kelas-kelas sosial yang menimbulkan adanya perbedaan-perbedaan tujuan-tujuan dan sarana yang tersedia. Kemudian dari perkembangan tersebut,

⁹ Zudan Arif Fakrulloh, *Seri Belajar Hukum: Berhukum dalam Keadaan Darurat*, Kuliah Umum S3 dalam Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Jakarta 21 April 2020

¹⁰ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 159.

¹¹ Otje Salman, *Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 72.

¹² Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, “Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)” *Journal Unnes Pandecta*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 13 No.1 Juni 2018, hlm. 4.

anomie juga dapat terjadi karena perbedaan struktur kesempatan.¹³

Selanjutnya konsep ini dikembangkan oleh Merton terhadap penyimpangan tingkah laku di masyarakat telah melembaga suatu cita-cita (*goals*) untuk mengejar sukses semaksimal mungkin dan pada umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Untuk mencapai sukses yang dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara-cara tertentu yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh seseorang. Namun dalam kenyataannya, tidak semua orang dapat mencapai cita-cita dimaksud melalui cara-cara yang telah dibenarkan. Oleh karena itu, terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita tersebut melalui cara yang melanggar Undang-Undang. Pada umumnya mereka yang melakukan cara yang bertentangan dengan Undang-Undang tersebut, berasal dari masyarakat kebawah dan golongan minoritas.¹⁴

Merton mendefinisikan anomie sebagai kesenjangan antara tujuan-tujuan sosial bersama dan cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, individu yang mengalami anomie akan berusaha mencapai tujuan bersama dari suatu masyarakat tertentu, namun tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan sah karena berbagai keterbatasan sosial. Akibatnya individu itu akan memperlihatkan perilaku menyimpang untuk memuaskan dirinya sendiri.¹⁵

E. Kerangka Konseptual

Peneliti memberikan kerangka konseptual terhadap istilah-istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Alasan Peniadaan Pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang telah melakukan rumusan delik,

untuk tidak dipidana karena kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.¹⁶

2. Tindak pidana menurut Pompe adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹⁷
3. Pencurian adalah berasal dari kata curi yang curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹⁸
4. Daya Paksa (*Overmacht*) adalah suatu pengertian yang normatif dimana seseorang karena ancaman bahaya dipaksa melakukan suatu perbuatan pidana walaupun dia tidak menghendaki melakukan perbuatan tersebut.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka jenis penelitian/pendekatan ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepastakaan,²⁰ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menjadikan bahan kepastakaan sebagai tumpuan utama.

2. Sumber Data

a. **Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan Bahan yang diteliti, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. KUHP
3. KUHAP

¹³ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 87.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 96

¹⁵ *Ibid.* hlm. 97

¹⁶ <https://menuruthukum.com/2020/04/29/dasar-peniadaan-pidana-dan-peringatan-pidana-dalam-kuhp/> diakses tanggal 9 Oktober 2021.

¹⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa*

Komentar), Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 34.

¹⁸ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 346-347.

¹⁹ <https://www.situshukum.com/2021/01/dasar-dasar-peniadaan-pidana.html> diakses tanggal 9 Oktober 2021

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 23.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar, buku, artikel, serta laporan artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atas studi documenter. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu peneliti mengambil kutipan dari buku, literatur, atau buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.²¹ Peneliti menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, dimana dalam menetapkan suatu

kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.²²

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan hukum pidana mempergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²³ Menurut Jonkers, *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Lamintang berpendapat dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁵

3. Jenis-Jenis Delik

Pembagian jenis-jenis delik sebagai berikut :

- a. Kejahatan dan Pelanggaran
Kejahatan disebut delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang tidak baik dan seharusnya dipidana. Sedangkan pelanggaran sering

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, op.cit, hlm. 25.

²² Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²³ Amil Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa*

Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP, Yogyakarta, 2012, hlm. 18.

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 75.

²⁵ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 193.

disebut sebagai delik undang-undang, artinya baru dipandang sebagai delik jika sudah tercantum dalam undang-undang (*wet-delicten*).²⁶

- b. Delik Formil dan Delik Materiil
Delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materiil menitikberatkan pada akibat.
- c. Delik Komisi dan Delik Omisi
Delik komisi pada hakikatnya melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang.²⁷ Sedangkan delik omisi yaitu tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang.²⁸
- d. Delik Mandiri dan Delik Berlanjut
Delik mandiri dilakukan satu kali dan mengakibatkan pelaku dipidana. Sedangkan delik berlanjut ialah perbuatan yang sama dilakukan berulang kali sehingga merupakan satu rangkaian perbuatan.
- e. Delik Selesai dan Delik Berkesinambungan
Delik selesai adalah setiap perbuatan yang telah memenuhi semua rumusan delik dalam suatu ketentuan pidana. Sedangkan delik berkesinambungan pada dasarnya ialah perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan yang dilarang secara berlanjut.²⁹
- f. Delik Berkualifikasi dan Delik *Privilege*
Delik berkualifikasi adalah delik dengan pemberatan karena keadaan-keadaan tertentu. Sedangkan delik *privilege* adalah delik yang ancaman pidananya diperingan karena ada unsur yang meringankan.

- g. Delik Sengaja (*Dolus*) dan Delik Kelalaian (*Culpa*)

Delik sengaja menghendaki bentuk kesalahan berupa kesengajaan dalam rumusan delik. Sedangkan delik kealpaan menghendaki bentuk kesalahan berupa kealpaan dalam rumusan delik.

- h. Delik Biasa dan Delik Aduan
Delik aduan adalah delik yang untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara tersebut tidak dibutuhkan pengaduan. Delik aduan adalah delik yang baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari yang berhak.³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Sarjana-sarjana klasik seperti W.L.G Lemaire menyatakan bahwa hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telat dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.³¹

2. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Dengan demikian, maka ruang lingkup hukum pidana pada dasarnya membahas tiga masalah sentral dalam hukum pidana, yaitu ³² :

- a. Perbuatan apa saja yang dilarang kemudian lazim disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan perbuatan yang dapat dipidana.
- b. Pertanggungjawaban pidana yaitu keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm. 133.

²⁷ Eddy O.S Hiarej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 137.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.* hlm. 144.

³⁰ *Ibid.* hlm. 145.

³¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1.

³² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 12.

membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana.

- c. Tentang pidana itu sendiri, yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab.

3. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/ tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dengan demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat harta benda milik individu.³³

4. Fungsi Hukum Pidana

Dalam hal pembagian fungsi hukum pidana yakni fungsi umum dan fungsi khusus, singkatnya fungsi umum hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum, sedangkan fungsi khusus hukum pidana, selain melindungi kepentingan hukum juga memberi keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan umum.³⁴

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana yang Terjadi di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

A.1. *Cyber Crime*

Cyber crime atau ialah suatu kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang seorang korban menderita kerugian dan seorang pelaku dengan sengaja memperoleh

keuntungan atau akan telah memperoleh keuntungan.³⁵ Di masa pandemi *Covid-19* ini kejahatan dunia maya meningkat, hal ini dipicu oleh persentase populasi yang terhubung ke internet dan waktu yang dihabiskan untuk online, dikombinasikan dengan rasa kurungan dan kecemasan dan ketakutan yang ditimbulkan pandemi *Covid-19*, telah memberikan lebih banyak peluang bagi penjahat siber untuk mengambil keuntungan dari situasi dan menghasilkan lebih banyak uang atau menciptakan gangguan.³⁶

Menurut data dari POLRI, bulan April 2020 sampai Juli 2021, terdapat 937 kasus yang dilaporkan. Dari 937 kasus tersebut terdapat tiga kasus dengan angka tertinggi yaitu kasus *provocative*, *hate content* dan *hate speech* sekitar 473 kasus. Disusul dengan penipuan *online* dengan 259 kasus dan konten porno dengan 82 kasus.³⁷

Tren kejahatan baru selama pandemi ini terjadi yaitu memanfaatkan barang dan alat kesehatan dengan menaikkan harga atau menimbunnya yang menjadikan kelangkaan di masyarakat umum. Selain itu juga informasi hoaks tentang pandemi *Covid-19*. Para pelaku ini mengambil keuntungan dari keterbatasan masyarakat selama pandemi ini terjadi.³⁸

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan selama masa pandemi terdapat 88 juta serangan siber. Baru saja satu bulan sejak pandemi di bulan Maret-April 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melaporkan adanya 474 kasus *hoax*, khususnya di *Facebook* dan *Youtube* yang dapat

³³ Erdianto Effendi, *Op.cit.* hlm. 33.

³⁴ Eddy O. S. Hiarej, *Op.cit.* hlm. 35.

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 18.

³⁶ Sahat Maruli Tua Situmeang, "Fenomena Kejahatan di Masa Pandemi *Covid-19*: Perspektif Kriminologi", *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol. 19 No.1, April 2021, hlm. 40.

³⁷ Bhakti Eko Nugroho, "Modus Baru Cyber Crime di Tengah Pandemi Covid-19", makalah disampaikan pada *Webinar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)*, Jakarta, 15 Juli 2021.

³⁸ *Ibid.*

dikategorikan sebagai kejahatan menurut Pasal 27 dan 28 UU ITE.³⁹

A.2 Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dengan berbagai pembatasan di tempat kerja, sekolah, dan tempat atau fasilitas umum, akhirnya orang lebih banyak tinggal di rumah. Kondisi ini menimbulkan masalah baru dalam keluarga, termasuk tindak kekerasan. Kondisi ini dapat bertambah parah pada keluarga dengan ekonomi yang tidak menentu akibat pandemi. Meningkatnya beban keluarga, stres, dan kesulitan ekonomi akibat kehilangan sebagian penghasilan/pekerjaan berpotensi memicu konflik dalam keluarga. Akhirnya dapat terjadi KDRT dan kekerasan berbasis gender lainnya.⁴⁰

Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) menunjukkan terdapat 110 kasus KDRT yang telah dilaporkan sejak pemberlakuan PSBB dari tanggal 16 Maret-20 Juni 2020. Dalam kurun waktu 3 bulan tersebut, angka kasus KDRT telah mencapai setengah dari angka kasus KDRT selama 2019.⁴¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang meningkat selama pandemi *Covid-19*. Hal ini terungkap dari survei yang digelar pada April-Mei 2020 secara daring oleh Komnas Perempuan. Survei dilakukan terhadap 2.285 responden dan sebanyak 80 persen dari responden pada kelompok berpenghasilan di bawah Rp 5 juta

rupiah perbulan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.⁴²

A.3 Kejahatan Jalanan

Kejahatan jalanan (*street crime*) atau yang biasa juga disebut dengan *blue collar crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kalangan kelas bawah yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi rendah. Kejahatan ini ramai dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari kalangan kelas bawah yang menyandang tingkat pendidikan dan ekonomi rendah, dan yang menjadi permasalahan utama dalam kejahatan ini adalah terkait dengan persoalan perut.⁴³

Di Indonesia, pandemi *Covid-19* telah meningkatkan kejahatan jalanan baik secara kualitas maupun kuantitas seperti jambret, pencurian, perampokan, curanmor, begal dan pembongkaran minimarket.⁴⁴ Pengamat Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad mengatakan maraknya aksi perampokan di minimarket terjadi karena pelaku terdesak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pandemi *Covid-19* pasalnya telah menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaannya.⁴⁵

Kemiskinan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap peluang terjadinya suatu kejahatan dimana tingkat kemiskinan yang tinggi menunjukkan adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan di sisi kebutuhan yang sangat banyak sementara alat pemenuh kebutuhan sangat terbatas. Kesenjangan sosial mengakibatkan kecemburuan sosial kemudian berlanjut pada gejolak sosial dan biasanya berakhir pada konflik

³⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Op.cit*, hlm. 45.

⁴⁰ Sali Susiana, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19", *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XII No. 24 Desember 2020, hlm. 15.

⁴¹ Komnas Perempuan, "Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Era Pandemi Covid-19 dan Kebiasaan Baru", *Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Policy Brief 1, hlm. 2.

⁴² Komnas Perempuan, "Dinamika Perubahan Rumah Tangga Selama masa Covid-19", Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2020, hlm. 8.

⁴³ Agus M., *Cooperative Learning*, Pustaka Media, Yogyakarta: 2010, hlm. 12.

⁴⁴ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op.cit*, hlm. 36.

⁴⁵ <https://www.republika.co.id/berita/q951c7328/pandemi-corona-dan-imbauan-siaga-bagi-minimarket>, diakses tanggal 9 Januari 2022.

sosial dan terjadinya suatu tindak kejahatan.⁴⁶

B. Alasan Peniadaaan Pidana atas Terjadinya Tindak Pidana di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya. Undang-undang telah memberikan dasar-dasar yang meniadakan pidana. Adanya aturan ini membuktikan bahwa undang-undang memisahkan antara tindak pidana dengan si pembuatnya. Pembentuk undang-undang membuat aturan ini bertujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, yang mendorong dan memengaruhi seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang. Pemikiran semacam inilah yang mendasari dibentuknya ketentuan umum perihal faktor-faktor yang menyebabkan tidak dipidanya si pembuat.⁴⁷ Dalam hukum pidana dikenal istilah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan dengan tegas dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (perbuatan yang berupa delik) tetapi tidak dipidana.⁴⁸

Dalam *Memorie van Toelichting* alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana kepada pelaku dibedakan menjadi dua, yaitu alasan yang berada di dalam diri pelaku yang terdiri dari pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP) dan umur yang masih muda, dan alasan yang berada diluar diri pelaku meliputi daya paksa (*overmacht*) (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP), melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) dan melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).⁴⁹ Lalu Fletcher berpendapat

bahwa dasar peniadaan pidana terbagi menjadi alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan dalam diri pelaku. Kesimpulannya ialah alasan pembenar berkaitan erat dengan unsur objektif (perbuatan), sementara alasan pemaaf berkaitan dengan unsur objektif (sikap batin pelaku).⁵⁰

Pembagian alasan peniadaan pidana lainnya adalah alasan peniadaan pidana yang terdapat dalam undang-undang dan diluar undang-undang. Alasan peniadaan pidana yang terdapat dalam undang-undang terdiri dari alasan penghapus pidana umum dan alasan penghapus pidana khusus. Alasan penghapus pidana yang umum adalah alasan penghapus pidana yang berlaku bagi semua tindak pidana. Sedangkan alasan penghapus pidana yang khusus yaitu alasan penghapus pidana yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja. Alasan penghapus pidana di dalam undang-undang yang bersifat umum terdiri dari tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), daya paksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat 1 KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat 2 KUHP), menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP), melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 ayat 1 KUHP), melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dengan iktikad baik (Pasal 51 ayat 2 KUHP).

Di tengah merebaknya pandemi virus *corona*, sering kali kita mendengar istilah *salus populi suprema lex*, yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.⁵¹ Adagium ini sejalan dengan cita-cita Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni “*Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah*

⁴⁶ Prasetyo, “Kausalitas Kemiskinan Terhadap Perbuatan Kriminal (Pencurian)”, *Media Komunikasi FIS*, Vol. 12 No. 1 April 2013, hlm. 44.

⁴⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2 Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 15.

⁴⁸ Ayu Efritadewi, *Modul Hukum Pidana*, UMRH Press Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, 2020, hlm. 28.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 41

⁵⁰ Daffa Dhiya, “Perbedaan Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana”, *Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan*, Jumat 12 Maret 2021.

⁵¹ <https://panmohamadfaiz.com/2020/09/03/memaknai-salus-populi-suprema-lex/>, diakses tanggal 22 Desember 2021.

Indonesia...” Kesimpulannya ialah negara dibentuk untuk melindungi (*law and order*) dan mensejahterakan rakyat (*welfare*) serta membahagiakan masyarakatnya.⁵²

Situasi pandemi menyebabkan Indonesia berada dalam keadaan darurat bencana. Presiden Jokowi menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Bencana Non Alam *Covid-19* sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020 lalu.⁵³ Cicero berpandangan ketika negara dalam keadaan darurat karena *Covid-19* maka langkah yang harus dilakukan adalah menjaga keselamatan rakyatnya, karena hal itu merupakan mandat dari konstitusi. Berhukum dalam keadaan darurat harus kembali pada tujuan mengapa negara itu dibentuk, yakni memprioritaskan pada keselamatan rakyat.⁵⁴ Kemanfaatan sosial merupakan arah hukum untuk kondisi darurat.⁵⁵

Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur masalah kedaruratan ini. Keadaan darurat dalam hukum pidana disebut *overmacht*. *Overmacht* merupakan salah satu alasan pembenaran atau peniadaan pidana. Pada bencana *Covid-19* yang berlangsung pada saat ini, negara menyatakan bahwa kondisi ini sudah sebagai kondisi darurat.⁵⁶ *Overmacht* merupakan kondisi seseorang melakukan tindak pidana karena dalam keadaan yang terpaksa disebabkan oleh kekuasaan yang tidak bisa dihindarinya atau keadaan dari luar yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum.⁵⁷

Pandangan J.E. Jonkers jika dikaitkan dengan situasi pandemi *Covid-19* maka situasi darurat yang relevan ialah *noodtoestand*, karena keadaan daruratnya berasal dari alam. Namun hal itu tentunya bukan menjadi alasan untuk melakukan tindak pidana ketika pandemi terjadi.⁵⁸ Sehingga menurut J.E. Jonkers, orang yang melakukan delik di masa pandemi *Covid-*

19 harus mempertimbangkan sikap batin orang melakukan delik tersebut, apakah sikap batin jahat atau sikap batin untuk menyelamatkan dirinya dari situasi kedaruratan. Perbuatan yang dapat dihapuskan penuntutannya jika sikap batin pembuat adalah untuk menyelamatkan dirinya dari situasi ini bukan karena sikap batin jahat untuk menimbun barang-barang atau mengambil keuntungan.⁵⁹

Menurut Wirjono Projodikoro *noodtoestand* adalah keadaan gawat dimana seseorang harus memilih antara dua kepentingan yaitu kepentingan yang salah satu untuk dikorbankan atau kepentingan lain untuk menyelamatkan dirinya. Ukurannya ialah kepentingan yang diselamatkan lebih besar daripada kepentingan yang dikorbankan.⁶⁰

Namun pada saat bencana pandemi ini, pidana juga dapat menjadi delik yang dikualifisir. Misalnya korupsi di era pandemi, hal itu dapat menjadi alasan untuk memperberat pidana. Namun itu beda kaitannya dengan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat. Kejahatan-kejahatan yang muncul akibat dari limitasi atau pembatasan pergerakan, pembatasan untuk bekerja dan berkumpul.⁶¹

Kebijakan mitigasi bencana *Covid-19* di Indonesia yang berupa karantina wilayah dan PSBB berdampak terhadap ekonomi masyarakat kelas bawah, terutama pekerja di sektor informal dan/atau pekerja harian. Bagi masyarakat kelas bawah, tidak keluar rumah dapat berarti tidak bisa makan pada hari tersebut. Terdapat beberapa kasus yang penuntutan hukumnya dihentikan atau dibebaskan selama pandemi *covid-19* terjadi :

1. Pada 18 April 2020 silam di medan seorang pria tertangkap melakukan pencurian beras dikarenakan kelaparan dan tidak punya uang untuk beli makan. Diketahui pria tersebut

⁵² Zudan Arif Fakrulloh, *Loc.cit*

⁵³ <https://bnpb.go.id/berita/indonesia-masih-dalam-status-keadaan-darurat-bencana-nasional> , diakses tanggal 23 Desember 2021.

⁵⁴ Ahmad Sofian, “Hukum Pidana dalam Keadaan Darurat”, makalah disampaikan pada *Webinar Kolegium Jurist Institute*, 25 April 2020.

⁵⁵ Zudan Arif Fakrulloh, *Loc. cit*.

⁵⁶ Nani Mulyati, “Hukum Pidana dalam Keadaan Darurat”, makalah disampaikan pada *Webinar Kolegium Jurist Institute*, 25 April 2020.

⁵⁷ Ahmad Sofian, *Loc.cit*.

⁵⁸ *Ibid*.

⁵⁹ *Ibid*.

⁶⁰ Nani Mulyati, *Loc.cit*.

⁶¹ Maradona, *Loc.cit*

tidak punya penghasilan setelah bengkel tepatnya bekerja sepi. Mendengar pengakuan pria tersebut, anggota kepolisian Polsek Medan membebaskannya dan memberikan bantuan berupa sembako dan uang untuk kebutuhan hidupnya.⁶²

2. Pelaku pencuri ayam, Yusuf melakukan pencurian pada 12 Desember 2021 di Brebes. Yusuf mencuri ayam tersebut lantaran anak perempuannya yang berusia 18 bulan menangis semalaman minta susu. Yusuf bekerja sebagai buruh serabutan, terlebih saat pandemi ini menyulitkan mencari uang. Pada 13 Januari 2022 Kepala Kejaksaan Negeri Brebes, Mernawati mengatakan, kasus ini dihentikan atas dasar kemanusiaan.⁶³
3. Seorang pria bernama Fajar Irawan di Sumatera Utara akhirnya keluar setelah menjalani kurungan karena pencurian 5 tandan sawit milik PTPN IV Unit Tinjowan, Kabupaten Simalungun. Kejari Simalungun memutuskan untuk menghentikan penuntutan terhadap Fajar. Diketahui Fajar kehilangan pekerjaannya karena pandemi *covid-19*. Pria yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarganya itu bekerja untuk menafkahi 2 orang saudaranya dan ibunya yang mengalami lumpuh. Menurut Kepala Desa, Anwar, keluarga Fajar tercatat sebagai penerima bantuan sosial program pemerintah, karena kondisi ekonomi yang kekurangan.⁶⁴

Dari beberapa kasus diatas dapat disimpulkan bahwa unsur pencurian telah terpenuhi. Namun perkara tidak dilanjutkan karena alasan

kemanusiaan. Pada tahap penyidikan di kepolisian, kasus tidak dilanjutkan karena perkara tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak berdampak konflik sosial, tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, pelaku bukan residivis, telah berdamainya kedua belah pihak yang bersangkutan, dan tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan korban manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Lalu pada tahap penuntutan di kejaksaan, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, tindak pidana dilakukan dengan nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2.5 juta dan pelaku bukan residivis. Hal ini tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020.

Dalam hal memutuskan perkara, hakim harus merujuk pada undang-undang yang berlaku. Namun di Indonesia hakim bukanlah corong undang-undang. Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Dalam konteks inilah, rumusan keharusan hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus diperhatikan. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan

62

<https://regional.kompas.com/read/2020/04/21/11023571/curi-beras-karena-kelaparan-pria-ini-tertangkap-warga-dan-dapat-bantuan?page=all> diakses pada 10 Januari 2022.

⁶³<https://arahpantura.aboutsemarang.id/kejari-brebes-hentikan-proses-hukum-terdakwa-pencuri-ayam-demi-beli-susu-anaknya/> , diakses tanggal 15 Februari 2022.

64

<https://regional.kompas.com/read/2021/10/08/102814378/atas-pertimbangan-jaksa-pencuri-5-tandan-sawit-akhirnya-dibebaskan?page=all> , diakses tanggal 14 Februari 2022.

ketentuan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Menurut Roeslan Saleh menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan Pancasila⁶⁵.

BAB IV PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan dan sebagai berikut:

A. Kesimpulan.

1. Bentuk-bentuk tindak pidana yang terjadi di masa pandemi Covid-19 ialah *cybercrime*, KDRT dan kejahatan jalanan. Data yang didapatkan dari POLRI pada bulan April 2020-Juli 2021 terdapat 937 kasus dengan angka kasus tertinggi yakni kasus *provocative*, *hate content* dan *hate speech* sekitar 473 kasus, penipuan online dengan 259 kasus dan konten porno dengan 82 kasus. Tren kejahatan baru yaitu memanfaatkan barang dan alat kesehatan dengan menaikkan harga diatas normal atau bahkan menimbunnya. Selain itu juga informasi hoaks tentang pandemi *Covid-19*. Lalu BSSN menyatakan terdapat 88 juta serangan siber melalui aplikasi zoom. Berdasarkan data LBH APIK dalam kurun waktu tiga bulan sejak PSBB bulan Maret-Juni 2020 kasus KDRT mencapai setengah dari kasus KDRT selama tahun 2019. Survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pada tahun

2020 mencatat 80% responden mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dampak dari pandemi ini juga berpengaruh pada sektor ekonomi. Hal ini meningkatkan kejahatan jalanan baik secara kualitas maupun kuantitas.

2. Di tengah merebaknya pandemi virus *corona*, sering kali kita mendengar istilah *salus populi suprema lex*. Adagium ini sejalan dengan cita-cita Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulannya ialah negara dibentuk untuk melindungi (*law and order*) dan mensejahterakan rakyat (*welfare*) serta membahagiakan masyarakatnya. Situasi pandemi ini menyebabkan Indonesia berada dalam keadaan darurat bencana. Cicero berpandangan ketika negara dalam keadaan darurat karena *Covid-19* maka langkah pertama yang harus dilakukan negara adalah menjaga keselamatan rakyatnya, karena hal itu merupakan mandat dari konstitusi. Berhukum dalam keadaan darurat harus kembali pada tujuan mengapa negara itu dibentuk, yakni memprioritaskan pada keselamatan rakyat. Keadaan darurat dalam hukum pidana disebut *overmacht*. Pada bencana *Covid-19* yang berlangsung pada saat ini, negara menyatakan bahwa kondisi ini sudah sebagai kondisi darurat. Pandangan J.E. Jonkers jika dikaitkan dengan situasi pandemi *Covid-19*, maka situasi darurat yang relevan ialah *noodtoestand*, karena keadaan

⁶⁵ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 44-45.

daruratnya berasal dari alam. Namun hal itu tentunya bukan menjadi alasan untuk melakukan tindak pidana ketika pandemi terjadi. Sehingga menurut J.E. Jonkers, orang yang melakukan delik di masa pandemi *Covid-19* harus mempertimbangkan sikap batin orang melakukan delik tersebut, apakah sikap batin jahat atau sikap batin untuk menyelamatkan dirinya dari situasi kedaruratan. Perbuatan yang dapat dihapuskan penuntutannya jika sikap batin pembuat adalah untuk menyelamatkan dirinya dari situasi ini bukan karena sikap batin jahat untuk menimbun barang-barang atau mengambil keuntungan.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diperlukan regulasi khusus untuk menanggulangi keamanan siber dan kejahatan kriminal siber serta diperlukannya kesadaran sumber daya manusia terkait keamanan siber. Dibutuhkan kerukunan dan toleransi agar hubungan keluarga lebih erat, saling memahami antar anggota keluarga. Kejahatan jalanan merupakan kejahatan pada masa pandemi *covid-19* dan disebabkan oleh persoalan kemiskinan dan kurangnya pendidikan. Untuk itu diperlukan konsep untuk menanggulangi faktor-faktor tersebut. Selain itu dibutuhkan kesadaran individu untuk menjaga barang milik sendiri.
2. Dalam kondisi darurat pemerintah tidak dapat hanya menilai secara positivistik perbuatan tersebut sudah

memenuhi unsur pasal dan sudah dapat mempertanggungjawabkan dalam unsur hukum saja. Pertanggungjawaban pidana sangat berkaitan dengan kesalahan pelaku dan alasan pembeda atau pemaaf. Sehingga dalam sisi masyarakat, aparat penegak hukum harus lebih bijaksana dalam melihat dan menilai perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan ada sanksi pidananya. Jika memang tidak ada kesalahan atau ketercelaan dari perbuatan tersebut, maka hukum pidana tidak perlu digunakan. Karena hukum pidana merupakan last resort dan memiliki implikasi yang jauh sangat besar dibanding sanksi-sanksi lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Andi Zainal, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus M, 2010, *Cooperative Learning*, Pustaka Media, Yogyakarta.
- Anwar Yesmil Anwar dan Adang, 2016, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1993, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Hiarej, Eddy O. S, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.

Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung.

_____, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

TUJURhiti, Hyronimus, 2011, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Salman, Otje, 2012, *Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/ Skripsi/ Tesis/Makalah

- Adityo Susilo, 2020, "Corona Virus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit dalam Indonesia*, Universitas Indonesia, Vol. 7 No. 1 Maret.
- Ahmad Sofian, "Hukum Pidana dalam Keadaan Darurat", makalah disampaikan pada Webinar Kolegium Jurist Institute, 25 April 2020.
- Ayu Efridadewi, 2020, "Modul Hukum Pidana", UMRH Press Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau.
- Bhakti Eko Nugroho, 2021, "Modus Baru Cyber Crime di Tengah Pandemi Covid-19, makalah disampaikan pada Webinar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)", 15 Juli.
- Daffa Dhiya, "Perbedaan Alasan Pembenaan dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana", Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, Jumat 12 Maret 2021
- Eko G. Samudro, 2020, "Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid-19 yang Mengancam Ketahanan Nasional", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Universitas Pertahanan, Vol. 26 No. 2 Agustus.
- Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, 2018, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)" *Journal Unnes Pandecta*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 13 No.1 Juni.
- Harkristuti Harkriswono, 2020, "Angka Kejahatan dan Reaksi Sistem Peradilan Pidana di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 1 No. 1 Oktober.
- Komnas Perempuan, "Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Era Pandemi Covid-19 dan Kebiasaan Baru", *Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Policy Brief 1.
- Komnas Perempuan, "Dinamika Perubahan Rumah Tangga Selama masa Covid-19", *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2020.
- Maradona, 2021, "Aspek Pidana dalam Penegakan Hukum pada Kedaruratan Kesehatan Covid-19: Tinjauan Fungsi dan Keterbatasan Hukum Pidana di Masa Pandemi", *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*, 15 Oktober.
- Nani Mulyati, "Hukum Pidana dalam Keadaan Darurat", makalah disampaikan pada Webinar Kolegium Jurist Institute, 25 April 2020.
- Prasetyo, 2013, "Kausalitas Kemiskinan Terhadap Perbuatan Kriminal (Pencurian)", *Media Komunikasi FIS*, Vol. 12 No. 1 April.
- Rela Rizki Pratiwi, Hasrina Nurlaily, Demi Artha, 2020, "Analisa Yuridis Penetapan Covid-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Journal Inicio Legis*, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 1 No. 2 Oktober.
- Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan dan Anisa Ashari, 2020, "Optimasi Peran

Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7 No. 7.

Sahat Maruli Tua Situmeang, 2021, “Fenomena Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi”, Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol. 19 No.1 April.

Sali Susiana, 2020, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19”, Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XII No. 24 Desember.

Wibowo Hadiwardoyo, 2020, “Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19”, BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship, Vol. 2 No. 2 April.

Zudan Arif Fakrulloh, 2020, “Seri Belajar Hukum: Berhukum dalam Keadaan Darurat”, Kuliah Umum S3 dalam Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Jakarta 21 April.

C. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KUHP

KUHAP

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. Website

<https://money.kompas.com/read/2020/05/05/125329026/akibat-corona-jumlah-penduduk-miskin-ri-bisa-capai-379-juta-orang?page=all> , diakses tanggal 9 Oktober 2021.

<https://menuruthukum.com/2020/04/29/dasar-peniadaan-pidana-dan-peringatan-pidana-dalam-kuhp/> diakses tanggal 9 Oktober 2021.

<https://www.situshukum.com/2021/01/dasar-dasar-peniadaan-pidana.html> diakses tanggal 9 Oktober 2021

<https://www.republika.co.id/berita/q951c7328/pandemi-corona-dan-imbauan-siaga-bagi-minimarket> , diakses tanggal 9 Januari 2022.

<https://panmohamadfaiz.com/2020/09/03/maknai-salus-populi-suprema-lex/> , diakses tanggal 22 Desember 2021.

<https://bnpb.go.id/berita/indonesia-masih-dalam-status-keadaan-darurat-bencana-nasional> , diakses tanggal 23 Desember 2021.

<https://regional.kompas.com/read/2020/04/21/11023571/curi-beras-karena-kelaparan-pria-ini-tertangkap-warga-dan-dapat-bantuan?page=all> diakses pada 10 Januari 2022.

<https://arahpantura.aboutsemarang.id/kejari-brebes-hentikan-proses-hukum-terdakwa-pencuri-ayam-demi-beli-susu-anaknya/> , diakses tanggal 15 Februari 2022.

<https://regional.kompas.com/read/2021/10/08/102814378/atas-pertimbangan-jaksa-pencuri-5-tandan-sawit-akhirnya->

dibebaskan?page=all , diakses tanggal 14
Februari 2022.